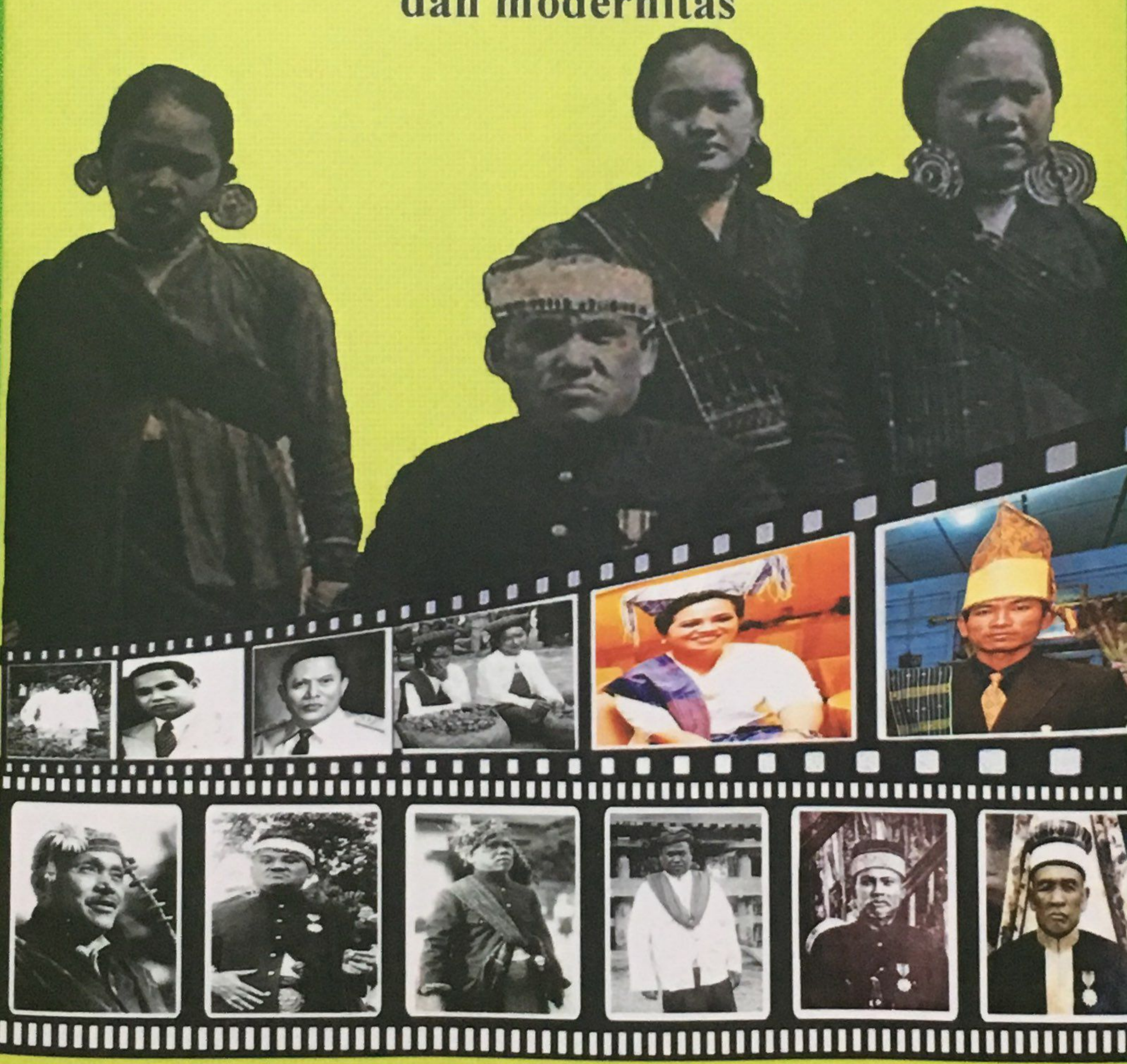


Erond L. Damanik

BUSANA SIMALUNGUN

Politik busana, peminjaman selektif
dan modernitas



BUSANA SIMALUNGUN

Politik busana, peminjaman selektif
dan modernitas

BUSANA SIMALUNGUN

Politik busana, peminjaman selektif
dan modernitas



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

BUSANA SIMALUNGUN

Politik busana, peminjaman selektif
dan modernitas

Erond L. Damanik

**Simetri Institute
Medan
2017**



Perpustakaan Nasional
DAMANIK, Erond L. penulis
BUSANA SIMALUNGUN

Politik busana, peminjaman selektif dan modernitas
Cet. 1 - Medan, Simetri Institute
Februari, 2017

Cambria, size, 11; Halaman, 6 + 29 + 245

ISBN:978-602-14104-9-3

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Busana Simalungun | 2. Politik busana |
| 3. Peminjaman selektif | 4. Modernitas |
| I Judul | II. Damanik, Erond L. |

Hak cipta 2017, pada penulis @ Erond L. Damanik
Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan
cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi,
tanpa seizin sah dari penerbit.

Cetakan pertama, Februari 2017

Desain sampul	: Ater Budiman Sinaga
Layout	: Julianto Ramadhan
Pembaca naskah	: Apriani Harahap Muhammad Rivai

Gambar sampul:

Busana tradisional Simalungun

Diterbitkan oleh:

Simetri Institute

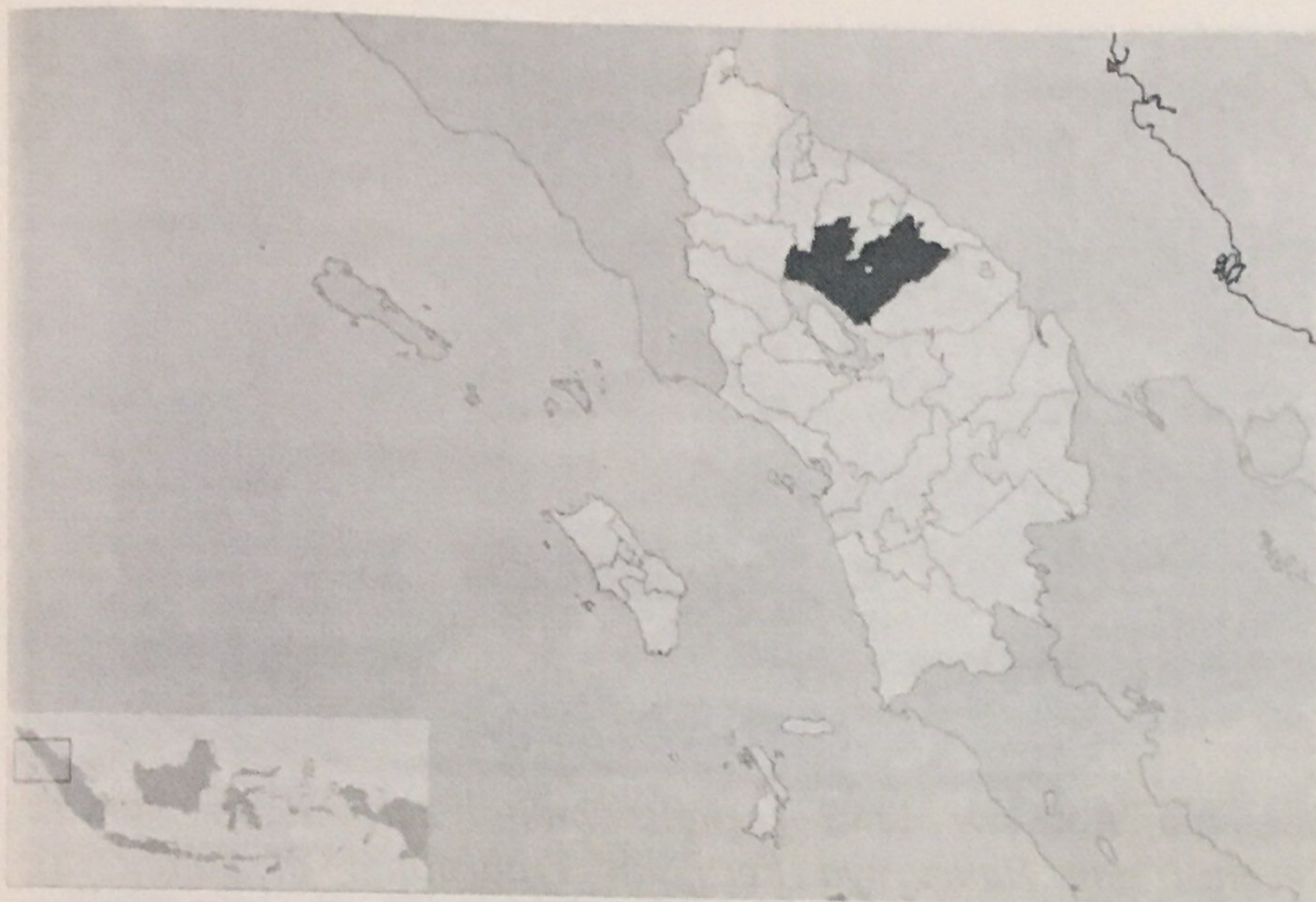
Jalan Pelajar Timur

Gg. Sehati Medan

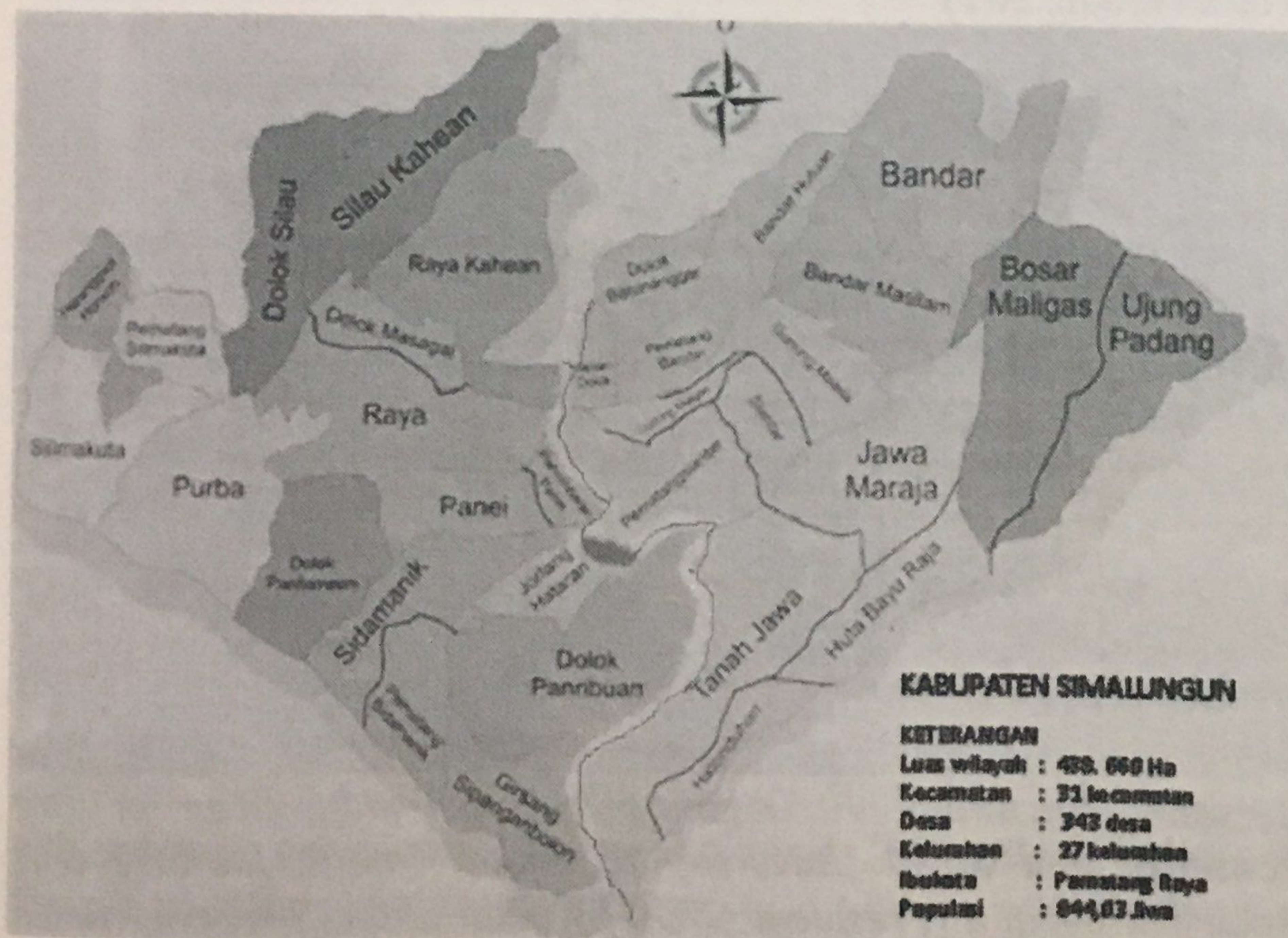
20225 Sumatera Utara

Email: simteri.institute@gmail.com

Dicetak oleh Sigma Printshop, Yogyakarta
Isi diluar tanggungjawab percetakan



Peta Provinsi Sumatera Utara



Peta Provinsi Sumatera Utara, skala 1: 400.000



Bersama Anthony Reid (*penulis buku: Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Tradisional di Sumatera*), Direktur *Asia Research Institute, National University of Singapore* dan Dr.phil. Ichwan Azhari, MS (Ketua Pussis-Unimed) di Hotel Tiara Medan, 2011



Bersama Herminio V. Dagohoy (*Rector Magnificus of the Pontifical and Royal University of Santo Tomas, Manila*) dan Amarjiva Lochan (*President SSEASR*) pada *SSEASR International Conference* di Manila tahun, 2013.

PENGANTAR PENERBIT

Buku *'Busana Simalungun: Politik Busana, Peminjaman Selektif dan Modernitas'* adalah pertanggungjawaban moral dan akademis penulisnya bagi masyarakat Simalungun. Penulisan ini bermula dari partisipasi penulisnya menjadi narasumber Seminar Nasional: *'Pemakaian Busana Simalungun: Menuju Kearifan Lokal'*, diselenggarakan Lembaga Penelitian Universitas Simalungun di Pamatangsiantar pada 15 Desember 2015. Pasca seminar itu, penulisnya terdorong menggali lebih jauh dan mendalam 'tradisi' berbusana di Simalungun. Sumber penulisan ini adalah laporan perjalanan prakolonialisme, nota penjelasan kolonialisme maupun arsip foto yang tersimpan di *kitlv.nl. (online)* maupun *collectie tropenmuseum institut.nl. (online)*.

Buku ini menyuguhkan 'tradisi' berbusana bagi Orang Simalungun yang tidak bisa dilepaskan dari ordonansi pakaian di Nusantara selama periode VOC-Belanda (1602-1799), pakaian era kolonialisme Belanda (1800-1942) dan kolonialisme Jepang (1942-1945) ataupun Misi Sungai Rhein Jerman (1903-1963). Perjumpaan pakaian kultur lokal dan kultur Barat ini mencerminkan 'peminjaman selektif dan modernisasi pakaian' di Simalungun, guna membentuk relasi kekuasaan politik, ekonomi dan sosial (wibawa). Peminjaman selektif dan modernisasi pakaian di ruang kultur lokal Simalungun mendapat pengaruh dari kultur Barat (Belanda dan Jerman) maupun kultur Islam (Jawa).

Sebagaimana disebut dalam buku ini, 'berbusana' pada masyarakat di Nusantara sebelum periode VOC ialah dengan cara melilit 'kain' pada tubuhnya yang dalam perspektif Barat, dilihat sebagai 'ketelanjangan' (*nudity*). Lambat laun, cara ini berubah dengan mengadopsi '*pakaian setelan*' dan '*pakaian terusan*' Barat berwarna putih maupun hitam. Cara ini dilakukan 'raja' ataupun elit sebagai cerminan pejabat kolonial (*binnenland bestuur*). Demikian pula pakaian gaya Barat itu dipinjam selektif dengan melakukan adaptasi dengan kultur lokal sebagai cerminan

pejabat *zelfbestuur* (swapraja). Karena itu, pakaian berupa penutup kepala (topi), kemeja (jas tanpa kerah), kebaya, celana, sepatu maupun aksesoris pada kultur lokal adalah peminjaman selektif terhadap gaya berpakaian Barat.

Melonggarnya batasan atau ordonansi berpakaian pada permulaan kolonialisme Belanda memasuki pertengahan tahun 1800-an, (ditandai takluknya Diponegoro tahun 1830), menyebabkan tenunan Jawa diambilalih pengusaha tekstil Belanda. Revolusi Industri dan meningkatnya industri tekstil di Barat (Inggris) mempengaruhi gaya berpakaian di Nusantara. Kain-kain dari Barat dan India di impor guna memenuhi kebutuhan pakaian di Nusantara. Hal ini karena produksi kain batik dan jenis lainnya oleh pengusaha tekstil di Jawa, yaitu orang Belanda di Surabaya (1840) dan Pekalongan (1890) tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumen. Pada saat itu, kain produksi tekstil Jawa dirubah menjadi 'kebaya' (perpaduan kultur Jawa dan Barat Mestizo), 'celana', dan 'rok'. Inilah permulaan Barat 'menghias' masyarakat pribumi dengan menyebarluaskan tatacara berpakaian.

Pada waktu kolonialisme di Simalungun ditandai penandatanganan *Korte Verklaring* (1907), kain produksi Belanda di Jawa seperti kemeja, kebaya dan celana dijual ke Simalungun. Kain tenunan Simalungun, *Hiou* menjadi milik privat bangsawan yang mengalami adaptasi ditambah penggunaan aksesoris. Pada akhirnya, pakaian itu dipinjam selektif menjadi '*toluk balanga*', (kemeja pria), '*soja*' (kebaya perempuan) maupun celana dan rok ditambah sepatu. Dengan komodifikasi, pakaian ini 'disyahkan' menjadi busana tradisional Simalungun pada *Seminar Kebudayaan Simalungun* tahun 1964. Busana ini mencerminkan 'pembebasan' terhadap atribut kolonialisme maupun hegemoni etnik luar pasca Pergolakan Politik tahun 1958. Karena itu, busana Simalungun menunjukkan unsur peminjaman selektif dan modernitas mencerminkan identitas, kekuasaan (politik) dan prestise (wibawa) dan ekonomi. Busana adalah kulit sosial dan kebudayaan.

Medan, Februari 2017

Penerbit

PENDAHULUAN

Merupakan peristiwa umum di Indonesia bahwa pada waktu pelantikan kepala daerah (walikota, bupati dan gubernur) bahkan pejabat camat, lurah dan kepala desa sekalipun, maka mereka yang dilantik itu mengenakan 'busana setelan' berwarna putih (jas, kemeja lengan panjang, celana topi dan mengenakan sepatu dan dasi). Demikian halnya pada saat menyaksikan pelantikan kepala negara di Indonesia. Jika presiden terpilih adalah laki-laki maka ia tampil dalam balutan 'pakaian setelan' berwarna hitam berupa 'kemeja lengan panjang' dasi, 'jas berkerah lengan panjang', celana panjang, alas kaki dan penutup kepala yakni peci (*petje* dalam bahasa Belanda) berwarna gelap. Sedangkan jika perempuan yang terpilih maka ia akan mengenakan busana berupa sarung, kebaya, sepatu dan selendang. Dalam hal lain, pegawai pemerintah, militer dan kepolisian, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan bahkan karyawan perusahaan memiliki 'seragam' tertentu yang menandai 'identitas' dan 'wibawa' masing-masing. Menjadi pertanyaan adalah, dari manakah asal usul berpakaian di Indonesia?

Perjumpaan masyarakat pribumi Indonesia dengan orang Eropa khususnya Belanda dimulai saat masuknya VOC tahun 1602. Berdasarkan laporan-laporan VOC didapat bahwa masyarakat pribumi di *Batavia* (Jakarta) yang menjadi basis VOC pada saat itu menunjukkan 'ketelanjangan' (*nudity*). Kenyataan ini didasarkan pada kecenderungan membiarkan 'tubuh telanjang' baik laki-laki maupun perempuan. Kecenderungan 'berpakaian' pada masyarakat pribumi pada awal-awal VOC ini adalah menggunakan kain persegi panjang yang dililit diatas dada di bawah lengan hingga mencapai lutut (pada perempuan) sehingga bagian atas dada dan leher cenderung terbuka. Sedangkan laki-laki mengenakan kain persegi panjang dengan cara melilit kain itu sebatas pinggang hingga lutut dengan membiarkan perut dan dada tampak terbuka. Bahkan, tak satupun diantara mereka ini mengenakan alas kaki.

Kenyataan berpakaian seperti adalah jamak bagi seluruh perempuan dan laki-laki di Indonesia setidaknya pada awal abad tujuh belas. Kenyataan ini pula yang disebut Kartodirjo (1977) bahwa pengetahuan 'berbusana' bagi leluhur Indonesia telah lama diketahui sebagaimana terukir pada relief-relief Candi Borobudur. Namun demikian, terdapat pengecualian lain bahwa perempuan seperti di Bali, Dayak Manyan, Bugis, Karo, Nias, Minahasa, Lombok, Jawa dan lain-lain dimana sebagian perempuan membiarkan bagian atas tubuh terbuka sehingga buah dada jelas kelihatan.

Perspektif 'ketelanjangan' melihat masyarakat pribumi di Nusantara pada awal abad ketujuh belas ini bersumber dari paradigma orang Eropa (Belanda) yang hadir di Nusantara dengan '*busana Calvinis*' khas Eropa. Busana ini, mirip dengan 'mantel terusan' berwarna gelap, mengenakan topi warna gelap serta menggunakan alas kaki berupa sepatu bot.

Sebagaimana disebut Van Dijk (2005) dan Taylor (1983), selama pendudukan VOC di *Batavia*, ditetapkan ordonansi (peraturan) berpakaian seperti: i) pelarangan orang pribumi meniru dan menggunakan pakaian *Calvinis* baik topi dan aksesoris lain yang dikenakan oleh orang Eropa. Pakaian ini hanya dapat ditiru atau digunakan oleh pribumi penganut Calvinis, ii) pelarangan orang pribumi untuk mengenakan atribut pakaian dari etnik lain, iii) pelarangan etnik lain tinggal di daerah etnik tertentu dengan mengenakan pakaian etnik dari etnik yang tempatinya. Terhadap alasan kedua dan ketiga ini, VOC memiliki alasan khusus yaitu guna memudahkan pengidentifikasian manakala tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, pembunuhan terjadi. Karena itu, pelaku kriminal akan diketahui pada saat mengenali pakaian yang sedang dikenakannya.

Batasan atau ordonansi berpakaian seperti di era VOC ini semakin melonggar pada saat memasuki permulaan abad kesembilan belas. Bangkrut dan dibubarkannya VOC pada 31 Desember 1799, dimana seluruh aset VOC diambilalih pemerintah Belanda, bermaksud untuk menduduki *Netherland Hindia*. Untuk meletakkan sekaligus memantapkan rencana

pendudukan Belanda di Pulau Jawa, maka Daendles (orang Prancis) diutus Pemerintah Belanda sebagai gubernur jenderal di *Batavia*. Sementara di Eropa, Belanda masih terlibat perang dengan negara lain. Takluknya Diponegoro pada tahun 1830 menandai kolonialisme di pulau Jawa.

Pada saat kekalahan ini, produksi tenunan (tekstil) yang dilakukan perempuan Jawa diambilalih pemerintah kolonial dan kemudian memproduksi tenunan itu secara massal. Hasil produksi ini kemudian di jual ke seluruh pulau Jawa, termasuk ke daerah lain yang ditaklukan pemerintah kolonial Belanda. Tingginya kebutuhan kain pada saat itu, menjadi alasan bagi pemerintah kolonial pada tahun 1850 mengimpor kain dari India. Kenyataan ini berdampak pada lesunya tenunan tradisional. Namun demikian, sejak tahun 1840 dan 1890 telah muncul pengusaha kain batik yakni di Surabaya dan Pekalongan. Kedua pengusaha ini adalah orang Belanda.

Sejak saat itu, ordonasi berpakaian sebagaimana diterapkan VOC telah pudar dan sebaliknya terjadi sebuah proses kompleks dan dinamis mengenai peminjaman selektif, adaptasi timbal balik dan penataan ulang makna pakaian. Pada periode ini muncul 'pakaian terusan' yang dipakai oleh pejabat pemerintah kolonial di *Netherland Hindia*.

Kenyataan penggunaan 'pakaian setelan berwarna putih' ini mengingatkan pada era kolonial dimana birokrat atau pejabat pemerintahan kolonial (*binnenland bestuur*) selalu mengenakan 'pakaian setelan' berwarna putih mulai dari alas kaki hingga penutup kepala. Penulis seperti Taylor (1983) menegaskan bahwa 'pakaian setelan warna putih' di Eropa menandai keanggotaan 'kelas menengah' dalam stratifikasi masyarakatnya. Namun, pada saat 'pakaian setelan' berwarna putih itu dibawa ke Indonesia pada awal kolonialisme abad kesembilan belas, 'pakaian setelan berwarna putih' ini mengalami perubahan makna menjadi 'seragam penguasa pemerintahan kolonial'. Itulah sebabnya, seragam penguasa pemerintahan kolonial di Indonesia seperti gubernur jenderal, residen (gubernur), asisten residen (bupati), *burgermeister* (walikota), *controleur* atau kontelir (camat), dan lain-lain selalu tampil mengenakan

seragam berupa 'busana setelan' berwarna putih. Tidak hanya itu, sewaktu era perkebunan di Sumatera Timur, pakaian setelan berwarna putih inipun diadopsi '*toean keboen*' (*planter*) sebagai seragamnya untuk melambangkan keanggotaan '*upper class*' yaitu '*white collar*' atau '*witte societeit*'¹ (kerah putih) pada tatanan masyarakat terjajah.

Pada periode-periode gerakan nasional di Indonesia, 'kaum terdidik (intelektual dan politisi) bangsa ini terutama yang menerima pendidikan Barat di era kolonial, cenderung mengidentifikasi diri sebagai 'orang Barat' (untuk membedakannya dengan masyarakat pribumi lainnya) dengan cara memakai 'pakaian setelan berwarna putih' khas Barat seperti tokoh nasional Soekarno, Hatta, Agus Salim, Syahrir, Tjokroaminoto dan lain-lain atau bahkan tokoh lokal Sumatera Utara seperti Ferdinan L. Tobing, Muhammad Hasan, Tengku Mansur, Karim MS, Muhammad Amir, J. Wismar Saragih, Djason Saragih dan lain-lain. Itulah sebabnya, tokoh nasional seperti proklamator Indonesia, Soekarno dan Hatta pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 tampil dengan 'busana setelan warna putih', tetapi tidak memakai dasi.

Sebagai catatan, dasi diganti dengan 'kerah terbuka' sehingga bagian depan leher tampak terbuka adalah pengaruh pendudukan militer Jepang. Pada era pendudukan militer Jepang, bukan hanya penggunaan dasi yang 'menghilang' tetapi juga penggunaan 'pakaian setelan Barat'. Sementara itu,

¹ Asosiasi berupa '*Witte Societeit*' atau '*white collar*' (kerah putih) di Medan dibentuk tahun 1879 dan menjadi simbol '*toean keboen*' (*planter*). Kantor asosiasi ini berada di *Postweg* (jalan Kantor Pos atau kini jalan Bukit Barisan). Pada tahun 1980-an, asosiasi ini berganti nama menjadi '*Medan Club*' yang kini berkantor di sebuah bangunan eks *kuil Shinto* (dewa Matahari Jepang) di jalan R.A. Kartini. Di Siantar, didirikan kantor yang sama disebut dengan '*Simalungun Club*' tahun 1925 di Jalan Sutomo yang menandai 'Masyarakat Kulit Putih' (*witte societeit*) yaitu golongan pengusaha di kawasan itu. Biasanya, di tempat ini, para planter saling ngombrol, makan dan minum sambil mendengarkan musik dan yang paling penting adalah membicarakan bisnis yang mereka lakukan di tempat masing-masing.

penggunaan peci berwarna gelap makin meluas sebagai perlambang 'kesatuan nasional'. Menurut Beynon (1995), para perempuan Indo-Eropa dan perempuan Indonesia terpelajar memutuskan menukar pakaian Barat dengan 'sarung' dan 'kebaya' sehubungan dengan pendudukan Jepang itu. Itulah sebabnya, S.K. Trimurti seorang perempuan berpendidikan Barat mengenakan 'kebaya' dan 'sarung' serta mengenakan 'kerudung' pada saat pengibaran Bendera, 17 Agustus 1945 (Adams, 1965).

Disamping 'pakaian setelan berwarna putih' terdapat 'pakaian setelan berwarna hitam' yang di Eropa sebagai tanda keanggotaan kelas menengah. Namun di era kolonialisme di Indonesia, 'pakaian setelan berwarna hitam' inipun menjadi seragam 'kantoran' penguasa pemerintahan kolonial. Menurut Taylor (1983), pakaian setelan berwarna hitam ini menandai keseriusan dan soliditas 'para kulit putih' yang sangat rapi untuk menekankan jarak antara penguasa kolonial dengan masyarakat terjajah yang tidak dapat dijembatani. Menurut Wilson (1985), 'pakaian setelan warna hitam' dalam batas divisi kelas yang ada memiliki pengaruh egalitarian yang kuat dan membuat laki-laki menjadi partisipan aktif dalam negara-bangsa modern.

Pada era pasca-kolonial, busana berupa 'pakaian setelan berwarna putih' berubah menjadi pakaian resmi pada saat pelantikan pejabat-pejabat kepala daerah dan kepala pemerintahan, sedangkan 'pakaian setelan warna hitam' berubah menjadi 'pakaian setelan bisnis' ataupun menjadi 'pakaian setelan' resmi politisi dalam partisipasinya pada kancah politik nasional Indonesia. Tidak hanya itu, 'pakaian setelan berwarna hitam' ini menjadi 'busana resmi' kepala negara, kepala pemerintahan, duta negara dan lain-lain dalam pertemuan-pertemuan internasional untuk membicarakan hubungan atau relasi antar negara.

Dewasa ini, pakaian-pakaian resmi kenegaraan bertalian dengan kekuasaan dan gender. Laki-laki selalu ditampilkan dengan mengenakan kemeja, celana, dasi, jas dan sepatu (serta sering dipadu dengan peci warna gelap), yang sesungguhnya merupakan adaptasi 'pakaian setelan Barat. Sedangkan perempuan ditampilkan dalam balutan 'sarung dan kebaya' yang

dilegitimasi sebagai 'busana kultur asli' Indonesia. Karena itu, muncul pula pertanyaan: mengapa perempuan Indonesia selalu tampil mengenakan 'sarung dan kebaya' yang disebut dengan 'kostum tradisional' sementara laki-laki tampil dengan busana Barat?

Menurut Taylor (1983), sarung dan kebaya bukanlah kultur 'asli' Indonesia. Pada awal abad sembilan belas, kebaya menjadi kostum perempuan Jawa maupun Indo (peranakan). Kemudian, sejak tahun 1870, kebaya juga digunakan perempuan Eropa yang datang ke Indonesia. Sarung dan kebaya merupakan hasil dari serangkaian perkembangan kolonial hingga pascakolonial secara spesifik. Sarung dan kebaya (kebaya warna putih untuk perempuan Eropa dan kebaya gaya-gaya khusus untuk budak dan nyai atau selir) terlahir dari percampuran adaptasi-adaptasi kebudayaan keraton Jawa dan Mestizo. Di era kolonial Belanda, sarung dan kebaya ini menjadi tandingan bagi 'pakaian setelan Barat'.

Kemudian, di era kekuasaan Raffles di pulau Jawa, sarung dan kebaya berpindah menjadi pakaian privat khususnya bagi perempuan Eropa di Jawa. Hal ini karena Raffles memperkenalkan 'pakaian terusan khas Eropa' yang dikenakannya sehari-hari. Pada awal abad duapuluh, sarung dan kebaya hanya terbatas pada perempuan pribumi, sedangkan perempuan Indo (peranakan) maupun perempuan Barat kembali mengenakan 'pakaian setelan' atau 'pakaian terusan' yang sepadan dengan kekuasaan kolonial kulit putih. Menurut Wieringa (1995), sikap Soekarno terhadap perempuan yang lebih cenderung didorong oleh kekaguman dan hasrat dibanding keinginan tulus untuk memasyarakatkan persamaan hak, sarung dan kebaya muncul diantara kelompok elit dan mendapatkan status sebagai 'pakaian nasional'. Pada masa Orde Baru, sarung dan kebaya mendapat tambahan berupa tas dan kaca mata hitam sebagaimana sering dikenakan Ibu Tien Soeharto.

Menurut Taylor (1983), ketika seorang perempuan ditampilkan dalam busana tradisional, kesannya adalah untuk menciptakan citra spesifik tentang masa lalu dan meletakkan perempuan ke dalam masa lalu itu. Dalam kerangka ini,

perempuan dikesankan seolah menjadi penjaga esensi nasional, sementara laki-laki memalsukan jalan-jalan baru ke dalam masa depan bangsa. Melalui 'pakaian setelan', para laki-laki Indonesia mendeklarasikan diri sebagai ahli waris Barat (Belanda) dalam peran mereka sebagai pemimpin (bukan sebagai warga negara). Tubuh perempuan digambarkan menolak Barat dan evolusi historisnya, menuju berbagi ruang publik dan kebebasan-kebebasan pribadi.

Tidak hanya menyangkut pakaian birokrat, pasukan perang Jawa di Surakarta juga meniru pakaian perang khas Eropa. Jika pakaian perang Eropa lebih memperhatikan fungsionalnya seperti kemeja, celana, bedil, pedang, topi khas Legion Romawi, dan sepatu bot, maka pada pasukan Legiun Mangkunegaran Surakarta, celana diganti dengan 'sarung'. Tampaknya, peniruan ini hanya didasarkan pada aspek estetika saja, tanpa memperhatikan fungsi-fungsi pakaian sebagaimana dikenakan legiun Mangkunegaran itu.

Pada masa Orde Baru, perpaduan celana panjang, jas, kemeja tanpa dasi dan peci sebagaimana disebut Nordholt (2005) bukan lagi menjadi simbol eksklusif nasionalis, tetapi menandai suatu identitas islam. Sementara, sarung dan kebaya didaulat sebagai 'pakaian nasional' yang mencerminkan 'tradisi asli' perempuan Indonesia. Demikian pula 'busana safari' mengadaptasi 'pakaian militer Jepang' berupa jas berkerah lengan pendek dan celana panjang didaulat sebagai 'pakaian resmi' birokrat negara pada saat melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah. Sementara itu, celana panjang, jas, kemeja, dasi dan sepatu (pakaian setelan Barat) dengan tambahan peci menjadi pakaian resmi kenegaraan sedang tanpa peci menjadi pakaian resmi kunjungan atau pertemuan kepala-kepala negara.

Penggunaan pakaian-pakaian seragam di Indonesia pascakolonialisme sebagaimana tampak pada militer dan polisi, pegawai negeri, karyawan perusahaan dan bahkan organisasi mengadaptasi 'seragam' militer Jepang semasa pendudukannya 1942-1945 di Indonesia. Masa-masa pendudukan Jepang di Indonesia sebagaimana ditegaskan Nordholt (2005) adalah 'demam seragam' berwarna 'krem' atau kekuning-kuningan'

sebagai *esprit de corps* yakni sesuatu yang belum pernah terjadi di era pendudukan Belanda. Kenyataan ini sangat dipengaruhi kekuasaan militer Jepang dan dalam upaya menarik dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang.

Pada masa ini, militer Jepang membentuk 'Barisan-barisan Pemuda' seperti *Pembela Tanah Air (PETA)* di Pulau Jawa, *Heiho* dan *Giyugun* di Sumatera, kepolisian, pasukan pembunuh gerak cepat (*Kenkokutai*) baik di gunung yang disebut *mokutai* atau Harimau Liar² maupun pasukan Bela Pantai. Seluruh 'Barisan-barisan Pemuda' yang menjadi cikal bakal kelaskaran sekaligus embrio kemiliteran (TNI/Polri) di Indonesia ini diperlengkapi dengan 'seragam-seragam' mulai dari 'jas lengan pendek tetapi berkerah', celana, (keduanya menjadi cikal bakal munculnya busana safari), dilengkapi dengan topi, sangkur, dan sepatu bot. Pakaian 'seragam' ini terlihat fungsional sebagai 'pakaian perang' tetapi membentuk citra lain bagi Indonesia pascakolonialisme. Pakaian-pakaian ini kemudian ditiru dan menjadi model berpakaian di Indonesia masa kini yang tidak lepas dari 'seragam'.

Selama Orde Lama, militer memiliki seragam yang dominan warna hijau dan kepolisian memiliki seragam dominan berwarna abu-abu. Seragam ini adalah adaptasi dari seragam militer Jepang. Kemudian, selama Orde Baru, bukan hanya militer dan kepolisian yang memiliki seragam, tetapi juga pegawai negeri minimal memiliki tiga seragam: i) seragam departemen dalam negeri berwarna krem atau kekuning-kuningan, ii) seragam semi militer bela negara (*linmas*) berwarna kehijau-hijauan (mirip seragam hansip), dan iii) seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Sama halnya dengan organisasi seperti Pemuda Pancasila yang berseragam orange berliris hitam, Ikatan

² A. Elkana Saragihras, seorang tokoh Revolusi Sosial di Simalungun adalah alumni *Kenkokutai* dengan di daerah pegunungan *Mokutai* (Harimau Liar) yang mendapat pendidikan dan pelatihan selama enam bulan di Gunung Rintis, Deli Serdang. Setiap alumni dari pendidikan ini adalah berkewajiban merekrut dan melatih pemuda-pemudi lain guna membentuk pasukan-pasukannya.

Pemuda Karya berseragam abu-abu berliris hitam, FKPPi berseragam hijau berliris hitam dan lain-lain.

Pada era Reformasi, seragam-seragam pegawai negeri itu tetap dipertahankan hanya saja menambahkan 'seragam' lain yakni 'kemeja batik' sebagai pakaian resmi. Hal ini berkaitan dengan penetapan 'kriya batik' sebagai tenunan mahakarya Indonesia oleh UNESCO. Penggunaan 'kemeja batik' inipun diikuti oleh instansi non pemerintah seperti perusahaan, maupun tamu-tamu negara yang datang ke Indonesia.

Sebagai catatan tentang kain batik, menurut Taylor (1983), kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 mengakibatkan tenunan batik pribumi Jawa yang eksklusif bagi raja dan bangsawan diambilalih Belanda dan memproduksi kain tenunan sebagai 'kain pilihan' untuk dijual secara bebas. Kemudian, batik dirancang sebagai bahan pakaian bagi perempuan dan pakaian santai laki-laki. Dua pengusaha batik terkenal adalah Carolina von Franquemont memulai bisnis batik tahun 1940 di Surabaya dan, Eliza van Zuylen memulai bisnis batik tahun 1890 di Pekalongan. Sejak tahun-tahun ini, batik bukan lagi eksklusif bagi raja dan bangsawan Jawa, tetapi sudah dapat dibeli oleh setiap orang, baik Jawa maupun Indo serta orang Eropa.

Adaptasi kultur pakaian luar selain Barat, juga muncul dari Arab (Islam). Pakaian-pakaian bercorak islam ini adalah seperti *jubah* dan penutup kepala, *turban*. Pakaian berupa kain panjang tanpa dipotong ini digunakan melilit tubuh atau dibuat menyerupai *tunika* atau lajim disebut '*baju bodo*' atau '*baju kurung*' yakni pakaian penutup tubuh mulai dari pangkal leher hingga mata kaki. Pada awal abad sembilan belas, pakaian-pakaian bergaya Arab (Islam) ini diadopsi oleh elit-elit islam di Jawa terutama di pantai utara menjadi pakaian perang. Gaya pakaian perang ini ditampilkan oleh Diponegoro (1825-1830) atau ditempat lain seperti di Minangkabau sebagaimana dikenakan Tuanku Imam Bonjol.

Dewasa ini, pakaian khas perempuan Muslim sangat mudah dikenali dari pemakaian 'pakaian terusan' tanpa kerah (mirip jubah) yang dipergunakan mulai dari pangkal leher hingga mata kaki ditambah penutup kepala yang disebut kerudung atau

jilbab. Sedangkan pakaian laki-laki islam ialah 'gamis' yakni semacam kemeja tapi tidak memiliki kerah, ditambah dengan pemakaian penutup kepala yang disebut 'kopiah' atau 'lobe'. Pada era Reformasi, pakaian khas laki-laki islam seperti di Arab yakni *jubah* atau lebih dikenal dengan '*baju bodo*' atau '*baju kurung*' muncul kembali sebagaimana dikenakan oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI). Singkatnya, sejarah berpakaian (berbusana) di Indonesia sebagaimana disebut van Dijk (2005) menunjukkan tiga kultur yang berbeda yaitu: i) kultur Pribumi berupa sarung, ii) kultur Eropa (Barat) berupa celana, dan iii) kultur Arab (Islam) berupa jubah. Ketiga kultur pakaian ini menunjuk pada suatu proses yang kompleks dan dinamis mengenai peminjaman selektif, adaptasi timbal balik dan penataan ulang makna pakaian.

Hiou, soja dan toluk balanga di Simalungun

Simalungun adalah tempat dimana 'pertemuan' untuk berdagang bagi para pedagang lokal (*local traders*) maupun pedagang asing (*foreign traders*). Kenyataan ini tampak pada posisi wilayah kultur Simalungun sebelum 1907 yang bersinggungan langsung dengan perairan Selat Malaka. Kenyataan seperti ini merujuk pada tulisan Anderson yang mengunjungi pesisir Sumatera Timur tahun 1823. Demikian pula bahwa tempat 'pertemuan' yang dalam bahasa Simalungun disebut dengan 'Bandar' ditemukan pada hampir seluruh wilayah kultur Simalungun baik di Kabupaten Simalungun, Bedagei, Deli Serdang maupun Asahan. Kata ini identik dengan 'Pertumbukan' dalam bahasa Karo, maupun 'Kota' dalam bahasa Melayu. Namun, sejak tahun 1907, sejalan dengan *korte verklaring*, maka wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan Melayu dan islam itu dikeluarkan dari Simalungun pada saat membentuk *onderafdeling* Simalungun. Disamping untuk memisah orang Simalungun dengan Melayu, cara ini dilakukan untuk mempermudah penguasaan tanah di Simalungun.

Di 'Bandar', orang Simalungun bertemu dengan masyarakat luar guna berdagang dan bersosialisasi dengan masyarakat luar. Adapun perdagangan yang tercatat pada tulisan Anderson tahun

1823 adalah seperti emas, padi, tembakau, kapas, gading, lada, kacang, getah lilin, maupun budak. Kenyataan ini sekaligus membuat masyarakat Simalungun mengenal pakaian (*bhusana*) yang pada awalnya hanya dililitkan pada sekujur tubuhnya kemudian berkembang menjadi di 'pakai' seperti keadaan sekarang. Perkembangan busana di Simalungun lebih lanjut dipengaruhi oleh *Misi Sungai Rhein Jerman* (sejak tahun 1903) maupun Kolonialisme Belanda dan perkebunan Eropa (sejak 1907).

Sama seperti cara berpakaian pada masyarakat lainnya di Batavia sebagaimana terdokumentasi pada laporan VOC, maka berpakaian pada orang Simalungun dilakukan dengan cara melilit kain persegi panjang pada sekujur tubuhnya. Di Simalungun, kain persegi panjang ini disebut dengan *Hiou*. Menurut Anderson (1971) panjang *Hiou* mencapai 4,5 cubit dan lebarnya mencapai 2 cubit. *Hiou* adalah produksi masyarakat Simalungun terutama istri raja (*puang*) terutama permaisuri (*puangbolon*) yang diperoleh dengan cara memintal benang (*martonun*) ataupun merajutnya (kain *wiru*). Itulah sebabnya, pada setiap istana raja (*rumah bolon*) seperti di Pamatangpurba, terdapat bangunan khusus bagi permaisuri (*pattangan puangbolon*) yang dikhususkan untuk bertenun atau menerima tamu-tamu perempuan kerajaan lainnya di Simalungun.

Kerajinan tenun maupun merajut (*wiru atau knitting*) kain persegi panjang seperti di Simalungun ini juga terdapat di Batubara sebagaimana dilaporkan Anderson (1971). Barangkali bukan kebetulan bahwa kerajinan memintal benang (*martonun*) sudah dikenal lama pada orang Simalungun. Hal ini tampak pada budidaya serat (*agave*) pada era kolonial Belanda di Dolog Ilir Simalungun sebagaimana dilaporkan Tideman (1926).

Warna *Hiou* sebagaimana disebutkan Anderson (1971) adalah biru gelap (*dark blue*) dengan liris merah atau putih yang dirajut pada *Hiou*. Pewarna biru gelap berasal dari tumbuhan spesies *Indigo* (tarum) ataupun akar-akaran dari tumbuhan lain untuk menghasilkan warna lain yang tumbuh di Simalungun. Bahan dasar pembuatan *Hiou* berasal dari kapas (*cotton*) yang tumbuh di Simalungun seperti di Tanah Jawa, Siantar dan Dolog Silau.

Adapun jenis *Hiou* sebagaimana dicatat Anderson (1971) pada saat kunjungannya ke pantai timur Sumatera (*Eastcoast of Sumatera*), adalah seperti *mergum sisi*, *guru gundang*, *suri-suri*, *rinjap*, *ragi bedouan*, *sabila garam*, *sibottar*, *ragi sihorpa*, *ragi sihoram*, *tonompiak*, *ragi attuanga*, dan *ragi parboulak*. Demikian pula terdapat *Hiou* yang disebut dengan '*ragi tolu*' yaitu *ragi suri-suri*, *ragi junjung* dan *ragi siantar* dengan pola dan garis yang berbeda. Disamping sebagai komoditas dagang, yang paling umum adalah bahwa *Hiou* digunakan sebagai penutup tubuh laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, *Hiou* digunakan mulai dari bagian atas dada dibawah lengan hingga mencapai lutut (*marabit datas*) sedangkan laki-laki melilitkan *Hiou* pada bagian pinggul hingga sebatas lutut (*marabit toruh*).

Sebagaimana disebut Van Dijk (1894), laki-laki Simalungun mengenakan kain katun, kain bawah dan penutup kepala, sementara celana tidak digunakan. Demikian halnya perempuan mengenakan kain atas dan kain bawah serta penutup kepala. Aksesoris tambahan yang dilihat van Dijk (1894) adalah menggunakan cincin serta pisau, namun tidak mengenakan alas kaki. Pengamatan van Dijk (1894) ini mendeskripsikan penampilan orang Simalungun bangsawan (*partongah*) sebagaimana dilihatnya di Tanjung Kasau. Jelas sekali bahwa cara berpakaian itu menunjukkan pengaruh kultur luar yang bersinggungan dengan kultur Simalungun di daerah pesisir seperti Tanjung Kasau.

Kolonialisme Belanda di pulau Jawa mulai menancapkan pengaruhnya pada permulaan abad ke-19, dan dalam berbusana ditandai dengan hilangnya ordonansi berpakaian seperti era VOC. Sejalan dengan itu, pembentukan kerajaan-kerajaan kolonial terus dilakukan hingga ke Simalungun pada awal abad ke-20. Pembentukan kerajaan-kerajaan ini ialah sebagai cara 'mendekatkan diri' pemerintah kolonial Belanda dengan masyarakat pribumi. Di Simalungun, kerajaan-kerajaan tradisional itu ditundukkan dengan cara membuat kesepakatan bersama yaitu '*korte verklaring*' pada tahun 1907 yang ditandatangani ketujuh raja dan seluruh *parbapaan* Simalungun. Era ini menandai kolonialisme di Simalungun yang telah

dinantikan pengusaha perkebunan yang tertunda selama 18 tahun karena perlawanan Sang Na Ualuh Damanik (raja Siantar). Pada waktu itu, pengusaha perkebunan sangat mengharapkan tanah-tanah di Simalungun guna melakukan ekspansi *cultuurgebied*-nya. Pasca *korte verklaring* tahun 1907 itu, tak satupun kerajaan Simalungun bangkit melawan kolonialisme Belanda tetapi justru menjadi 'hamba' atau 'boneka' kolonial.

Dalam hal 'berbusana' yang paling nyata dari masuknya kolonialisme ke Simalungun adalah masuknya kain-kain dari pulau Jawa ke daerah koloni ini sejak tahun 1907. Pada saat bersamaan, aktifitas menenun yang dipraktekkan keluarga istana Simalungun yang eksklusif hanya bagi keluarga istana, secara perlahan mulai menurun dan digantikan dengan kain-kain impor dari pengusaha Belanda di Pulau Jawa. Pada saat yang bersamaan pula, aktifitas Misi Sungai Rhein Jerman sedang giatnya bekerja untuk 'memanusiakan manusia' dengan mengubah 'ketelanjangan' menjadi 'berbusana'.

Dalam kerangka ini, kebutuhan kain dalam jumlah besar sangat dibutuhkan bagi orang-orang Simalungun yang dipandang 'telanjang', yaitu sebuah makna terhadap kekotoran dan kemunduran peradaban. Kenyataan seperti inilah yang menandai matinya kerajinan memintal benang (*martonun*) pada masyarakat Simalungun, sementara kegiatan itu hanya terbatas pada keluarga istana, dan di sisi lain kebutuhan terhadap kain sangat tinggi, maka impor kain pun menjadi keharusan. Pada situasi seperti inilah kain-kain persegi panjang produksi pengusaha Belanda di Pulau Jawa masuk ke daerah Simalungun dan mempengaruhi cara berbusana di daerah koloni ini. Lambat laun, kain tenunan para *puangbolon* ini menjadi milik privat keluarga istana dan tidak meluas penggunaannya di Simalungun.

Pada permulaan abad kedua puluh, cara berbusana di Simalungun diperagakan oleh tiga pengaruh besar, yaitu: i) pemerintah kolonial Belanda, ii) zendeling Misi Sungai Rhein Jerman, dan iii) pengusaha perkebunan Eropa seperti Inggris, Belgia dan Amerika Serikat. Busana pemerintah kolonial Belanda ditampilkan dengan 'pakaian setelan berwarna putih dan hitam' berupa jas yang memiliki kerah dan celana, memakai topi khusus

dan alas sepatu. Cara berpakaian seperti ini ditampilkan oleh residen, asisten residen, *bürgermeister* maupun *controleur*. Sedangkan busana *zendeling* Misi Sungai Rhein Jerman cenderung mengenakan 'pakaian setelan' berwarna hitam berupa jas dan kerah yang menutup leher (adaptasi dari pakaian Calvinis abad ke-17), mengenakan celana dan sepatu tetapi tidak memakai dasi. Cara berpakaian seperti ini diperagakan oleh *zendeling-zendeling RMG* seperti August Theist, Henry Guillame, G.K. Simon termasuk Ludwig Nommensen. Sedangkan pengusaha perkebunan yang disebut dengan *toean keboen* atau *planter* ini tampil dengan 'pakaian setelan' berwarna putih, mengenakan celana, topi khusus dan sepatu bot. Sebagaimana disebut diatas bahwa 'pakaian setelan' khas Barat ini menandai keanggotan mereka dalam kelas menengah di Eropa tetapi di Indonesia berubah menjadi seragam pemerintah kolonial, seragam *zendeling* maupun seragam pengusaha perkebunan. Dalam arti bahwa, pakaian setelan ini menjadi penanda *upper class* orang Eropa pada susunan stratifikasi sosial masyarakat terjajah.

Pakaian-pakaian seperti ini 'ditularkan' kepada raja (bangsawan) Simalungun serta *tungkat harajaan*-nya (perangkat kerajaan) karena dianggap sebagai tanda penerimaan mereka terhadap kultur dan orang Eropa. Untuk membedakan mereka (raja dan bangsawan) dari masyarakat Simalungun lainnya (kelas menengah; *paruma* atau budak; *jabolon*), maka pakaian mereka digantikan dari *Hiou* menjadi kemeja berupa jas tanpa kerah (*toluk balanga* dalam Bahasa Simalungun), mengenakan celana, maupun penutup kepala khusus (*tangkuluk*) serta alas kaki yaitu sepatu. Demikian pula kepada perempuan bangsawan, kain yakni *Hiou* yang tadinya digunakan melilit tubuh, kini diganti dengan kain kebaya (*soja* dalam bahasa Simalungun) namun tetap mengenakan *Hiou* yang dipakai menyerupai sarung maupun penutup kepala (*bulang*).

Jas tanpa kerah, topi, celana dan sepatu berfungsi untuk membedakan laki-laki bangsawan (raja) dan masyarakat lainnya yang berbeda makna dari *Hiou* atau *gotong*. Demikian pula *soja* berfungsi untuk membedakan perempuan bangsawan dari perempuan lainnya yang berbeda makna dari *Hiou* maupun

bulang. Selanjutnya, pemberian kekuatan dan gaya Barat ditekankan pada pakaian elit (raja) yang menyertakan objek lain seperti bros pengganti kancing baju, benang rajutan emas atau pita pada baju, medali atau satyalencana, *doramani* (hiasan gotong) maupun *rantei gotong* berbahan emas serta pedang (*pisou halasan*) bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan ditekankan pada penggunaan *sutting* (anting-anting), bros pengganti kancing *soja*, *rantei buah banban*, *golang* (gelang) yang terbuat dari emas ditambah aksesoris berupa 'tas tangan' dan mengenakan sepatu.

Berdasarkan analisis foto yang dilakukan terhadap berbusana pada kalangan bangsawan (raja) di Simalungun, pada umumnya memperlihatkan tiga penampilan busana yang berbeda yang menandai profesi dan status sosial yang berbeda. *Pertama*, raja Simalungun dalam balutan busana etnik berupa *gotong* (penutup kepala adat laki-laki) dan aksesorisnya, jas warna gelap tanpa kerah, *Hiou ragi panei* pengganti celana, mengenakan pedang (*pisou halasan*) serta memakai *hadang-hadagan* (selendang) berupa *suri-suri nanggar suasah*. Penampilan seperti ini memperlihatkan posisinya sebagai raja (bangsawan) Simalungun yang memiliki kelas sosial tertinggi pada susunan masyarakat Simalungun. Dengan demikian, penampilan itu mencerminkan kelas sosial dan wibawa yang menginginkan kepatuhan dari masyarakatnya. Dalam banyak situasi, raja-raja Simalungun mengenakan kostum ini pada saat menjamu pemerintah kolonial dalam perayaan tertentu yang menandai bahwa upacara itu dihelat oleh raja-raja Simalungun.

Kedua, raja Simalungun tampil mengenakan semacam 'pakaian setelan' berwarna gelap dengan liris putih pada kedua sisi kemejanya, mengenakan celana, sepatu serta *pasomin* (penutup kepala) yaitu songkok sejenis topi aristokrat maritim khas Asia Tenggara. Jenis topi ini merupakan jenis penutup kepala yang didaulat pemerintah kolonial Belanda sebagai penutup kepala orang pribumi yang menjabat sebagai pegawai pemerintah kolonial (*binnenland bestuur*). Dalam kerangka ini, pakaian menandai raja Simalungun sebagai pegawai pemerintah kolonial yang mendapat gaji, wewenang dan otoritas diwilayah

koloni pemerintah kolonial Belanda. Dalam banyak situasi, raja-raja Simalungun yang mengenakan pakaian seperti ini, maka dipastikan bahwa acara yang dihadapinya adalah dihelat oleh pemerintah kolonial. Karena itu, raja Simalungun hadir sebagai 'birokrat pemerintahan kolonial'.

Ketiga, raja Simalungun mengenakan 'pakaian setelan' berwarna putih seperti kemeja, celana dan mengenakan sepatu serta dasi (terkadang dasi kupu-kupu) dan terkadang dasi panjang yang diikatkan dileher. Cara berbusana seperti ini adalah meniru orang Eropa baik pemerintah maupun pengusaha kolonial sebagai cerminan 'kelas atas' di koloni Simalungun. Dengan demikian, cara berbusana seperti ini adalah upaya mensejajarkan diri atau mengidentifikasi diri dengan orang Eropa yang mengenakan kostum itu sebagai perwujudan 'kulit putih' untuk mengontrol dan memberi jarak pada masyarakat pribumi yang tidak terjembatani.

Cara berbusana yang ketiga yakni dengan 'pakaian setelan' berwarna putih adalah pilihan berbusana yang paling banyak ditiru oleh orang Simalungun pada era kolonial, khususnya bagi mereka yang memperoleh pendidikan ala Barat pada sekolah kolonial maupun sekolah *zending*, ataupun memiliki kedudukan sebagai pangulu balei, kerani dan lain-lain pada jabatan-jabatan kolonial. Cara berbusana ini memberi tanda sebagai 'kaum terdidik' pribumi sebagaimana diperagakan oleh tokoh-tokoh nasionalis maupun aktivis politik menjelang dan pasca kemerdekaan 1945. Tokoh seperti J. Wismar Saragih, Djason Saragih, Madja Purba, Djaidin Purba, bahkan Radjamin Purba dalam beberapa arsip foto masih memperlihatkan berbusana 'pakaian setelan' berwarna putih ini.

Pada saat yang bersamaan, kain impor dari pulau Jawa membanjiri Simalungun disamping untuk dijual kepada masyarakat pribumi Simalungun, juga untuk memenuhi kebutuhan kain di perkebunan. Pada situasi seperti ini, kain-kain kemeja dan celana kualitas rendah diperjualbelikan kepada masyarakat. Demikian halnya kain-kain kebaya (*soja*) dengan kualitas rendah banyak terdapat pada masyarakat Simalungun. Namun demikian, kemeja dan *soja* yang diperjualbelikan kepada

yang bersamaan, satu bulan sesudah revolusi itu, Simalungun masuk dalam konsep 'tatanan negara baru' tetapi tanah-tanah dan harta mereka habis diambil alih oleh masyarakat pendatang (*imigrant society*) (Damanik, 2015). Orang Simalungun menganggap perbuatan pasca revolusi itu sebagai sebuah ketidakadilan, sebuah pelanggaran bagi hak mereka sebagai 'tuan rumah' (*host society*) dan *sipukkah huta* (pembuka kampung) dan pemegang ulayat (*simada talun*).

Pasca revolusi itu, pemakaian *gotong dan bulang* maupun tanda-tanda (atribut) ke-Simalungun-an (*hasimalungunon*) hampir tidak dijumpai di Simalungun. Hal ini karena adanya ketakutan bahwa pada saat mengenakan kostum-kostum itu, maka dicap sebagai feodal dan menolak 'negara baru'. Selama hampir 20 tahun, pemakaian *gotong dan bulang* maupun aksesoris Simalungun lainnya terdegradasi. Bahasa mereka, tatanan adat mereka, konsep hak ulayat mereka, dan stigma feodal terus melekat selama 20 tahun pasca revolusi sosial.

Walaupun terdapat orang-orang berpengaruh di Simalungun seperti Djaidin Purba (berasal dari Nagori dekat Haranggaol lulusan hukum dari Leiden) dan Madja Purba (berasal dari Pamatangpurba lulusan hukum di Bukit Tinggi) yang keduanya pernah menjabat sebagai walikota Medan antara tahun 1950-1962), tetapi keduanya canggung bertindak sebagai orang Simalungun karena ketakutan terhadap stigma feodal yang dilekatkan pada orang Simalungun kala itu. Sejumlah intelektual lain seperti J. Wismar Saragih sangat berani 'mendobrak' hegemoni etnik lain guna 'memandirikan' etno-religio di tanahnya sendiri (Sinaga, 2004). Tindakan itu sungguh berani ditengah-tengah dominasi jumlah dan kualitas etnik lain itu. Ia menjadi pimpinan tertinggi pertama di institusi religio yang dimandirikannya itu. Hal senada ditunjukkan Radjamin Purba yang menjabat sebagai bupati Simalungun pada saat itu. Keduanya pantas dijuluki sebagai 'pioner' dan 'perumus' dan peletak dasar '*hasimalungunon*' pasca keolonialisme dan hegemoni kaum migran di Simalungun

Setelah munculnya kedua tokoh ini, barulah kewibawaan sebagai orang Simalungun muncul kembali pada permulaan

tahun 1960-an. Era ini ditandai pasca selesainya Pergolakan Politik 1958 yang membawa Sumatera Utara pada konflik antaretnik sejalan dengan pecahnya PRRI/Permesta (Bangun, 1982; Smail, 1968). Tahun 1963 ditandai dengan mandirinya etno-religio Simalungun, menjadi institusi yang merdeka dan bebas dari hegemoni etnik lain. Pada saat itu, institusi etno-religio itu dipimpin oleh orang Simalungun dan bahasa ibadahnya pun menjadi bahasa Simalungun.

Satu tahun kemudian, muncul pula upaya untuk menegakkan wibawa orang Simalungun melalui Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1964. Upaya ini adalah sebuah proses berkelanjutan dari pemandirian etno-religio setahun sebelumnya sebagai cara untuk mengidentifikasi, mereinventarisasi atribut-atribut hasimalungunon yang tergerus oleh pengaruh luar. Momentum ini menjadi penanda penting bagi tegaknya wibawa kultur Simalungun diantara etnik lain di ulayatnya sendiri.

Namun demikian, pesaing-pesaing baru muncul di Simalungun sejak Orde Baru tahun 1971. Orang Simalungun yang baru selesai menegakkan wibawanya melalui pemandirian etno-religio maupun mereidentifikasi atribut-atribut kulturalnya harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Pada era itu, pendidikan menjadi garda utama untuk mengisi kekosongan jabatan, kelesuan ekonomi maupun kelambanan gerak kultural di Simalungun. Pada saat itu, jumlah orang Simalungun yang mendapatkan pendidikan formal masih terbatas sementara persaingan memajukan dan mengejar ketertinggalan sangat dibutuhkan dari orang-orang terdidik itu. Pada akhirnya, lambat laun, orang Simalungun mampu mengejar berbagai ketertinggalan yang dialaminya guna menciptakan orang dan kultur Simalungun yang berkompetisi mengisi jabatan publik, menjadi pengusaha, menjadi politisi menjadi guru maupun dosen.

Pada Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1964, disepakati bahwa penutup kepala adat Simalungun adalah *gotong tikkal* (berbentuk destar yakni sisi tengah yang tegak lurus, bukan *lampei*) dan *bulang* (menyilang di kepala dan

memiliki rumbai atau kuncir di sisi kanan dan sisi kiri). Penutup kepala (seperti *gotong* diberikan aksesoris seperti mahkota (*rudang*), *doramani* tujuh tingkat (menandai tujuh kerajaan Simalungun) maupun *rantei gotong*. Sementara penutup kepala perempuan (*bulang*) diberikan aksesoris tambahan berupa *sutting*, *hudung-hudungan*, dan *rantei buah banban*.

Demikian pula bahwa pakaian adat Simalungun disepakati dengan menggunakan 'jas tanpa kerah' (*toluk balanga*). Pada kantung sebelah kiri 'jas tanpa kerah' itu terdapat benang berwarna emas yang dirajut (*wiru* atau *knitting*). Selain itu, busana ini harus mengenakan celana panjang yang kemudian dibalut dengan *Hiou ragi panei* serta mengenakan sepatu. Busana ini dilengkapi dengan pemakaian gelang besar (*golang banggal*) pada lengan tangan sebelah kiri dan kanan, serta menggunakan ikat pinggang (*ponding*). Diantara ikat pinggang itu, disematkan pedang (*pisou halasan*). Diujung kaki bagian bawah terdapat alas kaki yakni sepatu. Pada bahu sebelah kiri laki-laki, terdapat *hadang-hadangan* (selendang) yaitu *surisuri nanggar suasah*.

Sedangkan perempuan mengenakan *bulang* sebagaimana disebut diatas, juga mengenakan kebaya (*soja*) lengan panjang warna putih. Pada bagian bawah dikenakan rok panjang tetapi dibalut dengan *Hiou ragi panei*. Busana ini dilengkapi dengan ikat pinggang, kalung, dan gelang yang berwarna emas. Jika laki-laki disematkan pedang (*pisou halasan*) maka, perempuan mengenakan 'tas tangan' yang diganti menjadi *Badjud* atau tempat sirih. Pada ujung kaki, terdapat alas yaitu sepatu. Pada bahu sebelah kiri perempuan, terdapat *hadang-hadangan* (selendang) yaitu *surisuri nanggar suasah*.

Pada tahun 1964, pakaian tradisional Simalungun dirumuskan melalui Seminar Kebudayaan Simalungun di Pamatangsiantar, yaitu sebagai sebuah proses reidentifikasi identitas kebudayaannya. Seminar itu dilangsungkan setahun setelah kemandirian institusi etno-religionya dari dominasi etno-religio lain selama kurang lebih 50 tahun. Pada seminar ini, dirumuskan dan ditetapkan berbagai persoalan kebudayaan Simalungun seperti perkawinan, olahraga, kesenian, hak ulayat atas tanah, bahasa dan aksara, termasuk penggunaan penutup

kepala yaitu *gotong destar* (tegak lurus) dan *bulang* yang melintang di kepala serta aksesoris penutup kepala itu. Terdapat dua hal yang patut dicatat dalam seminar kebudayaan ini: i) mereduksi dominasi kultur etnik lain pada kultur Simalungun, ii) mereduksi identitas kolonial pada atribut-atribut pakaian tradisional Simalungun.

Dapat dipahami bahwa, sejarah berbusana di Simalungun memperlihatkan dua kultur yang berbeda yakni Simalungun dan Barat. Sebagaimana disebutkan van Dijk (2005) bahwa sejarah kultur pakaian menunjuk pada suatu proses yang kompleks dan dinamis mengenai peminjaman selektif, adaptasi timbal balik dan penataan ulang makna pakaian. Menyoal tentang peminjaman selektif serta adaptasi timbal balik ini, Brenner (1996) menegaskan bahwa 'keputusan untuk mengubah pakaian adalah proses kesadaran diri dan rekonstruksi diri', karena itu cara berpakaian yang baru menyebabkan perubahan perilaku'. Hal ini karena pakaian bukanlah sekedar 'penutup tubuh' tetapi menurut van Dijk (2005) pakaian menyiratkan pluralitas makna sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi menyangkut kelas sosial, status dan jenis kelamin.

Selanjutnya, meminjam konsep Taylor (1983), pakaian membuat suatu pernyataan tentang pandangan moral, religius dan politik pemakainya. Dalam hal lain, menurut Cohn (1989) bahwa pakaian dalam berbagai konteks berarti 'wibawa'. Demikian halnya pakaian sebagaimana disebut Kuper (1973) tidak memiliki bahasa dan makna tunggal tetapi memiliki pluralitas makna yang tergantung pada konteks bagaimana pakaian tersebut dipergunakan. Pada akhirnya, pakaian seperti disebut Wilson (1985) berperan besar dalam menentukan citra seseorang dimana pakaian adalah cermin dari identitas, status, hierarki, gender, nilai simbolik, dan merupakan ekspresi dari cara hidup (*habit*). Dengan demikian, pakaian adalah kulit sosial dan kebudayaan.

Medan, Februari 2017

Eld.

xxiii

DAFTAR ISI

Pengantar penerbit.....	i
Pendahuluan	iii
Daftar isi.....	xxv
Daftar gambar	xxvii
Daftar peta dan tabel	xxix
Bagian pertama: Politik pakaian dan tradisionalisme pakaian di Indonesia	
Bab I Politik pakaian pada era kolonial	3
A. Ketelanjangan: sakralitas dan imagi simbolik.....	4
B. VOC dan batasan berpakaian di Nusantara	16
C. Perkembangan pakaian di Indonesia.....	23
D. Lukisan dan foto: sumber analisis pakaian	39
Bab II Pakaian: kulit sosial dan kebudayaan	45
A. Pluralitas pakaian di Indonesia	45
B. Kebaya dan sarung: legitimasi 'pakaian asli'	48
C. Komodifikasi dan keaslian pakaian tradisi.....	52
D. Kulit sosial, identitas dan wibawa	60
Bagian kedua: Busana tradisional Simalungun: Peminjaman selektif dan modernitas	
Bab III Etnik Simalungun	71
A. Wilayah administratif dan kultural.....	71
B. Kisah asal usul orang Simalungun	79
C. Kelompok etnik Simalungun.....	90
D. Faktor perkebunan dan Misi Sungai Rhein.....	99
Bab IV Busana orang Simalungun	113
A. Evolusi pakaian dalam masyarakat manusia.....	113
B. Kain dan berpakaian pada orang Simalungun	119
Bab V Pengaruh luar terhadap pakaian Simalungun	133
A. Pengaruh busana Islam di Simalungun	133
B. <i>Soja, toluk balanga</i> , dasi dan sepatu	137
Bab VI <i>Gotong</i> dan <i>bulang</i> : wibawa dan identitas	173
A. Penutup kepala pada Orang Simalungun	173
B. Wibawa <i>gotong</i> dan <i>bulang</i>	177

C. Perubahan dan kontinuitas <i>gotong</i> dan <i>bulang</i> ...	184
Bab VII <i>Hiou</i> , pewarna alami dan ragam hias Simalungun	205
A. Jenis dan ragam hias <i>Hiou</i> Simalungun	206
B. Pewarna alami <i>Hiou</i> Simalungun	215
Bab VIII Penutup.....	219
Daftar Pustaka	231
Tentang penulis.....	245

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Potret ketelanjangan masyarakat Indonesia.....	10
Gambar 2. Lukisan <i>jubah</i> dan <i>turban</i> pedagang Arab.....	13
Gambar 3. Lukisan ketelanjangan Venus and Love, 1550.....	15
Gambar 4. Model <i>pakaian Calvinis</i> (mantel terusan).....	19
Gambar 5. <i>Pakaian setelan</i> J.Th. Cremer di Deli, 1880.....	22
Gambar 6. <i>Pakaian setelan NV. De Deli Maatschappij</i>	25
Gambar 7. Seragam <i>legiun Mangkunegaran</i> Surakarta.....	27
Gambar 8. Kartini dan Dojoadiningrat, 17 Des 1903.....	31
Gambar 9. Kultur <i>Indisch</i> , perpaduan sarung dan kabaya.....	33
Gambar 10. Peci hitam, baju setelan dan sepatu Soekarno.....	34
Gambar 11. <i>Pakaian resmi</i> kenegaraan Indonesia.....	35
Gambar 12. Seragam militer Indonesia.....	36
Gambar 13. Perempuan Karo tahun 1914 dan 1937.....	38
Gambar 14. <i>Pakaian setelan</i> Dokter T. Mansur, 1947.....	40
Gambar 15. <i>Pakaian Hiou</i> Simalungun.....	50
Gambar 16. Perbandingan seragam perang Barat dan Jawa....	58
Gambar 17. Lukisan Sir Thomas Stamford Bingley Raffles.....	64
Gambar 18. Lukisan Wolfgang Amadeus Mozart.....	65
Gambar 19. <i>Pakaian</i> pada serial film <i>Little house</i>	68
Gambar 20. Stasiun Kereta Api Dolog Malangir.....	100
Gambar 21. <i>Ambachtschool voor Inlanders</i> , 1926.....	103
Gambar 22. Gudang produksi teh PTP-IV Bah Butong.....	105
Gambar 23. Kompleks perumahan Bah Jambi, Simalungun....	107
Gambar 24. <i>Theefabriek</i> Balimbingan, Simalungun 1920.....	108
Gambar 25. RCMA Gunung Bayu, Simalungun 1930.....	109
Gambar 26. Simalungun Islam di Bandar tahun 1934.....	135
Gambar 27. Nisan Islam ditemukan di Nagaraja.....	136
Gambar 28. Pakain Raja Dolog Silau tahun 1900.....	139
Gambar 29. <i>Pakaian</i> Borahim Dasuha tahun 1939.....	141
Gambar 30. <i>Pakaian</i> raja-raja Simalungun di Siantar, 1937....	142
Gambar 31. <i>Pakaian</i> raja Simalungun sambut Tichelman.....	144
Gambar 32. <i>Pakaian</i> Tichelman dan Kama Damanik, 1936.....	145
Gambar 33. <i>Pakaian</i> Djaudin Saragih tahun 1935.....	147
Gambar 34. <i>Pakaian</i> Gomok Saragih sambut Kernebeek.....	148
Gambar 35. <i>Pakaian</i> Sawadim Damanik dan tiga putrinya.....	149

Gambar 36. Pakaian Kaliamsjah Sinaga dan istrinya, 1945.....	151
Gambar 37. Pakaian Kontrolir Simalungun dan Ihut Sinaga...	152
Gambar 38. Pakaian Raja Purba tahun 1937	153
Gambar 39. Pakaian Raja Purba dan Tingkat Harajaannya....	154
Gambar 40. Pakaian Sawadim Damanik di Pulo Tao.....	155
Gambar 41. Pakaian J. Wismar Saragih dan Vorhooeve dkk...	156
Gambar 42. Pakaian <i>Hoofden van Simalungun</i>	157
Gambar 43. Topi <i>Pasomin</i> Raja Simalungun.....	159
Gambar 44. Raja Simalungun mengenakan <i>Pasomin</i>	159
Gambar 45. Pakaian Sangmajadi Sinaga (raja Tanah Jawa)	160
Gambar 46. Pakaian <i>Soja, Tudung dan Sarung</i> , 1937	161
Gambar 47. <i>Tudung dan Soja</i> tahun 1940	163
Gambar 48. Padanan <i>bulang, soja dan Hiou Ragi Panei</i>	164
Gambar 49. Pakaian Raja dan <i>Puangbolon</i> Raya, 1937	165
Gambar 50. Seragam <i>legiun Habonaron</i> (pasukan Raya)	166
Gambar 51. Pakaian di Pasar Saribudolok, Simalungun	167
Gambar 52. Pakaian anak-anak di Purbasaribu, 1965.....	168
Gambar 53. Pakaian dan angkutan bus Sinar Raya, 1968	169
Gambar 54. Pakaian lengkap J. Tideman di Simalungun.....	170
Gambar 55. Pakaian Djaidin Purba dan Madja Purba	172
Gambar 56. <i>Porsa</i> , penutup kepala dukacita Simalungun	175
Gambar 57. <i>Gotong Partongah</i> di Simalungun hingga 1946....	182
Gambar 58. <i>Bulang partongah</i> Simalungun.....	183
Gambar 59. <i>Bulang paruma</i> atau <i>Tudung</i>	184
Gambar 60. Sawadim Damanik dalam tiga busana	187
Gambar 61. <i>Gotong Tikkal Partongah</i> (Destar) Simalungun ..	193
Gambar 62. <i>Bulang Partongah</i> Simalungun	196
Gambar 63. <i>Bulang</i> tanpa aksesoris, <i>soja</i> dan <i>surisuri</i>	199
Gambar 64. <i>Gotong</i> tanpa aksesoris busana Simalungun.....	200
Gambar 65. <i>Gotong dan bulang</i> beraksesoris	201
Gambar 66. Contoh busana adat Simalungun sejak 1964	203
Gambar 67. <i>Tangkuluk parhorja</i> pria Simalungun	204
Gambar 68. <i>Martonun</i> (memintal benang) di Simalungun	207
Gambar 69. Penjualan <i>Hiou</i> di Pekan Raya tahun 1939.....	210
Gambar 70. Tumbuhan pewarna alami <i>Hiou</i>	217
Gambar 71. Kreatifitas kain <i>Hiou</i> Simalungun	218
Gambar 72. Lukisan Sang Na Ualuh Damanik	230

DAFTAR TABEL DAN PETA

Peta 1. Wilayah <i>Sibalungun</i> (Simalungun), 1912.....	73
Peta 2. Lahan perkebunan HVA di Simalungun, 1935	111
Tabel 1. Kelengkapan busana adat pria sejak, 1964.....	194
Tabel 2. Kelengkapan busana adat perempuan sejak 1964	196
Tabel 3. Jenis-jenis <i>Hiou</i> Simalungun.....	210
Tabel 4. Motif ragam hias (<i>Pinar</i>) Simalungun.....	213